



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 55 /B.07/HK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, disebutkan dalam menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar penyusunannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/147/B.09/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator pada Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 1 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 55 /B.07/HK/2022
TANGGAL : 13-1-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Sekretaris Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
 5. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 7. Catur Wiyati, S.Sos. (Analisis Kepegawaian Muda pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 8. Dewi Indria Ningsih, SH. (Analisis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)
 9. Devianty, SH.,MH. (Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 10. Nuryansyah Agus, S.Sos., MM. (Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 11. Rini Oktriana Putri, S.Sos., M.Si. (Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 12. Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/65/B.07/HK/2022
TANGGAL : 13-1-2022

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

1. KETUA

1. Mengarahkan dan membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
2. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan;
3. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Kompetensi; dan
4. Menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi kepada Gubernur.

2. WAKIL KETUA

1. Membantu Ketua dan membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi;
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan membimbing anggota Tim Penyusun Standar Kompetensi; dan
3. Menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi kepada Ketua Tim.

3. SEKRETARIS

1. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. Menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau *workshop*; dan
3. Mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi.

4. ANGGOTA

1. Mengumpulkan dan menyusun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi;
2. Memberikan masukan/saran dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi;
3. Melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung, dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;
4. Melakukan diskusi, lokakarya atau *workshop*; dan
5. Menyusun hasil akhir Standar Kompetensi.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI